

PENDIDIKAN INKLUSIF: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Supardi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia.

supardi@uinmataram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang harapan dan kenyataan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri 20 Mataram. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan untuk semua anak tanpa bullying dan diskriminasi. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan terbaik bagi dirinya, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk bisa bersama-sama individu lainnya yang normal untuk duduk di sekolah yang sama dalam upaya mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Metode kualitatif menjadi bagian dalam penelitian ini untuk mengekplorasi setiap kejadian dan pristiwa penyelenggaran pembelajaran di sekolah inklusif. Hasilnya menunjukkan penyelenggara pendidikan inklusif di Nusa Tenggara Barat, khusus di SD Negeri 20 Mataram telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari aksesibilitas, kompetensi sumber daya, dan kemampuan dalam membangun networking dengan pihak lain.

Kata Kunci: pendidikan, inklusif, berkebutuhan khusus, berkeadilan.

Abstract

The purpose of this research is to describe the expectations and reality in implementing inclusive education at SD Negeri 20 Mataram. Inclusive education is education for all children without bullying and discrimination. Every individual has the same right to obtain the best educational services for himself, including for children with special needs (ABK), to be able to be with other normal individuals to sit in the same school in an effort to optimize their potential. Qualitative methods are part of this research to explore every incident and event of implementing learning in inclusive schools. The results show that the implementation of inclusive education in West Nusa Tenggara, specifically at SD Negeri 20 Mataram has been going well. This is demonstrated by accessibility, competence of resources, and ability to build networking with other parties.

Keywords: education, inclusive, special needs, justice.

1. PENDAHULUAN

Secara global di berbagai belahan dunia, telah berkembang cara pandang baru tentang pendidikan inklusif. Deklarasi Dakar tahun 2000 menetapkan bahwa Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan sekolah dasar bagi setiap anak perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi (Peters, 2004). Deklarasi tersebut disahkan oleh 92 negara dan 25 organisasi internasional yang mempertegas bahwa setiap anak memiliki karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang unik dan bagi mereka

yang memiliki kebutuhan khusus harus difasilitasi memiliki akses di setiap sekolah reguler serta mengakomodir mereka dengan pedagogi yang berpusat pada anak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Banyak ahli tertarik dan memiliki interpretasi berbeda-beda dalam mempersepsikan pendidikan inklusif. Menurut pandangan Ainscow, Slee, dan Best (2019) bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk

semua, pendidikan yang efektif kepada sebagian besar anak, meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya dari seluruh sistem pendidikan bagi suatu negara. UNESCO (2020) merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan merumuskan makna pendidikan inklusif sebagai sebuah strategi yang tepat dalam memenuhi keragaman kebutuhan anak dan pemenuhan hak asasi manusia untuk mengakses pendidikan yang layak tanpa terkecuali, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) atau disabilitas. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Barton dan Tomlinson (2012) bahwa pendidikan inklusif sebagai strategi kunci untuk perkembangan *Education for All* (EFA).

Dalam konsep ajaran Islam, pandangan tentang konsep pendidikan inklusif tersebut memperkuat subtansi tentang jati diri dan harkat martabat manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, seperti berbeda fisik, karakter, suku, Bahasa, bangsa dan jenis kelamin sebagai suatu kudrat untuk saling mengenal satu sama lain dan yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa (QS. Al-Hujurat ayat 13). Islam tidak mengenal istilah diskriminasi dalam pendidikan bahkan Islam sebagai agama yang menginspirasi manusia untuk selalu belajar dan berkarya serta mendorong manusia agar bermanfaat untuk orang lain. Bahkan dapat dikatakan pendidikan inklusif sebagai salah satu manifestasi ajaran yang dapat membawa kebaikan untuk semua.

Di Indonesia, pendidikan inklusif menjadi penting mengingat keragaman etnik, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya yang disatukan dengan konsep "Bhinneka tunggal ika". Secara eksplisit pendidikan inklusif diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Pemerintah telah mendorong lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah, baik sekolah umum atau madrasah dan pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan layanan pendidikan berkualitas secara inklusif untuk mempersiapkan generasi muda dalam memahami kehidupan nyata yang penuh keragaman. Di dalam amanah Undang Undang Dasar 1945 pasal 31, ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan" dan di ayat (2) berbunyi "Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

Implementasi dari amanah undang-undang tersebut pendidikan inklusif di Indonesia relatif sudah berjalan dan tersedia cukup banyak dibuka oleh lembaga-lembaga pendidikan resmi Pemerintah (negeri) dan lembaga swadaya atau swasta yang menyediakan ruang bagi pendidikan inklusi dilembaganya. Namun apabila dibanding dengan angka pertumbuhan anak berkebutuhan khusus, maka jumlah lembaga pendidikan yang ada tersebut belum memadai. Hal ini dibenarkan oleh Sri Wahyuningsih (2021) selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, menyebut bahwa selama satu tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup tinggi terkait ketersediaan akses pendidikan inklusi. Namun, di satu sisi, jumlah peserta didik di pendidikan inklusi tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Menurut sensus data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah anak berkebutuhan khusus yang berhasil didata terdapat sekitar 1,5 juta jiwa. Namun secara umum, PBB memperkirakan bahwa paling sedikit terdapat 10 persen anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, jumlah anak usia sekolah yang berusia 5-14 tahun terdapat sebanyak 42,8 juta jiwa. Apabila mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan terdapat kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Artinya jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia cukup besar. Data tersebut tentunya akan terus meningkat terutama disebabkan karena adanya wabah pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Pada tataran praktis penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia dilakukan dengan suatu sistem layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) di kelas regular (normal) bersama dengan teman sebayanya tanpa ada diskriminasi (Kusnia, 2019). Dengan demikian, pendidikan inklusi merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif hadir sebagai salah satu pendidikan alternatif yang dapat mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia dan merupakan pola layanan pendidikan yang memberikan ruang kepada ABK untuk menerima pendidikan di sekolah-sekolah reguler bersama teman sebayanya, dimana sekolah reguler memberi wadah kepada

para peserta didik di kelas yang sama dari berbagai macam karakteristik dan perbedaan kecerdasan sehingga para siswa dapat mengenyam pendidikan secara merata.

Konsep dasar pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan inklusi meliputi semua jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Kemendiknas, 2010), bahkan termasuk lembaga pendidikan tinggi.

Banyak pakar penelitian telah mengkaji pendidikan inklusif di Indonesia seperti penelitian yang dilakukan oleh Sulthon (2019) tentang pelaksanaan pendidikan dasar inklusif di Kabupaten Pati yang masih membatasi siswa difabel yang diterima di sekolah/madrasah. Penelitian oleh Supa'at dan Karim (2021) yang fokus untuk melakukan Peer Review Jurnal terkait pendidikan dasar inklusif di Kabupaten Pati (harapan dan kenyataan). Penelitian oleh Praptiningrum (2010) tentang fenomena pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Penelitian oleh Barsihanor & Rosyida (2019) mengenai implementasi pendidikan inklusi pada sekolah dasar islam terpadu Al-Firdaus Banjarmasin. Artikel penelitian yang mengkaji tentang identifikasi dan implementasi pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar Sumatra Barat (Angreni & Sari, 2020). Penelitian oleh Wulandari and Hendriani (2021) tentang kompetensi pedagogic guru di sekolah inklusi.

Ketertarikan para peneliti untuk meneliti tentang pendidikan inklusif tersebut sangat wajar mengingat pendidikan alternatif sebagai bagian dari proses menghilangkan pikiran dan perilaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas agar semua anak dapat menikmati pendidikan di sekolah/madrasah manapun tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan masa tersebut merupakan momentum yang terbaik untuk membantu mengoptimalkan perkembangan bahasa sosial, emosi, dan kognisi anak disabilitas maupun non-disabilitas (Alfian, 2013). Hal ini menjadi salah satu alasan penting penelitian ini dilakukan untuk dapat memberi kontribusi dalam pengembangan pendidikan inklusi di Daerah NTB.

Nilai kebaharuan artikel penelitian ini dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada nilai sejarah yang sangat penting sebagai momentum penyelenggaraan pendidikan inklusif di NTB. Dimana sekolah dasar Negeri 20 Mataram sebagai tempat terselenggaranya deklarasi pendidikan inklusi pertama di Daerah Nusa Tenggara Barat yang diprakarsai oleh Gubernur dan masyarakat NTB. Sebagai tindak lanjut deklarasi tersebut ditetapkan suatu kebijakan tentang peraturan Gubernur NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan Inklusi diseluruh sekolah yang ada di Kabupaten atau Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setiap sekolah/madrasah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi secara bertahap (Suara NTB.com 2021).

Secara kuantitatif jumlah sekolah/madrasah sebagai penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten/Kota di NTB yakni sebanyak 249 sekolah/madrasah, mulai dari jenjang pendidikan SD hingga SMA/MA dan SMK. Sebanyak 127 SD, 29 SMP, 2 SMA dan 1 SMK. Khusus untuk SMA di NTB baru SMAN 6 Mataram dan SMAN 1 Lape, Kabupaten Sumbawa sementara untuk SMK baru hanya SMK Negeri 5 Mataram yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk sekolah reguler. Pada tahun 2021 sekolah inklusi jumlah pendidikan menengah di Provinsi NTB mengalami kenaikan sebanyak 24 sekolah, dengan rincian 13 SMA dan 11 SMK. Saat ini ada tambahan tiga SMA sebagai sekolah inklusi yaitu SMAN 1 Mataram, SMAN 9 Mataram, dan SMAN 11 Mataram (Suara NTB.com, 2021). Pada jenjang pendidikan dasar, SD Negeri 20 Mataram merupakan salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Mataram yang memiliki jumlah anak berkebutuhan khusus paling banyak yakni 71 orang siswa dibandingkan dengan sekolah/madrasah di tempat lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif pada sekolah inklusi. Dengan penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran tentang gejala atau fenomena yang terjadi di lokasi atau objek penelitian. Peneliti mengamati secara langsung setiap gejala dan fenomena yang terjadi dengan beragam metode atau sumber guna mendapatkan data yang akuntabel. Proses ini, para pakar metodologi

penelitian menyebutnya dengan istilah triangkulasi (Creswell, 2012; Mishra and Alok, 2017). Berdasarkan hasil temuan berbasis triangkulasi metode tersebut dijadikan dasar untuk menarik simpulan (Nasution, 1998). Dengan penelitian kualitatif ini telah mendapat gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah inklusi.

Pencarian dan pengumpulan data dilakukan dengan metode *snowball* yakni suatu teknik menghimpun data atau informasi dari *key informant* (tokoh kunci) dan dikonfirmasi ke informan yang lain dengan melakukan observasi dan interview dengan berbagai pihak, diantaranya dengan kepala sekolah, guru pendamping khusus (GPK), guru bidang studi, wali murid, dan siswa. Hal ini sejalan dengan konsep Miles and Huberman (1992) terkait proses analisis data dengan model interaktif dan berkelanjutan. Model analisis interaktif tersebut ada tiga komponen utama yang dianalisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan inklusif pada dasarnya memegang suatu prinsip kesetaraan, hak asasi manusia, dan keadilan dalam pendidikan. Dengan mewujudkan pendidikan inklusif, akan tercipta masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan memungkinkan setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Fakta lapangan menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di lembaga-lembaga pendidikan tidak sedikit mengalami tantangan. Beberapa tantangan pendidikan inklusi di NTB termasuk di SD Negeri 20 Mataram diantaranya adalah keterbatasan sumber daya, kurikulum yang tidak inklusif, pelatihan dan dukungan bagi guru, stigma sosial dan kesadaran masyarakat, aksesibilitas fisik, kolaborasi dan koordinasi antarlembaga.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa Sekolah Dasar Negeri 20 Mataram selaku penyelenggaraan pendidikan inklusif secara umum telah menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam proses pelaksanaannya. Hal itu dapat dilihat dari aksesibilitas fisik yang tersedia di sekolah. Aksesibilitas fisik yang dimaksud dapat berupa kemudahan bagi setiap anak, terutama anak berkebutuhan khusus untuk bisa mengakses semua area sekolah dengan nyaman. Aksesibilitas fisik di Sekolah Dasar Negeri 20 Mataram menunjukkan indikator bahwa

lingkungan belajar yang ramah anak dan lingkungan sehingga kondusif bagi penyandang disabilitas untuk akses masuk-keluar dan berinteraksi dari satu bangunan ke bagunan lain di sekolah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tiga indikator di antaranya;

- a. Bangunan dan fasilitas umum yang tersedia di sekolah telah memenuhi keamanan dan kenyamanan bagi semua anak. Hal ini ditunjukkan dengan (a) adanya ruang gerak yang cukup cahaya dan posisi papan tulis yang direndahkan, bidang miring, toilet duduk bagi anak tuna daksa; (b) adanya ruang sumber belajar yang dapat memfasilitasi anak berkebutuhan khusus (ABK), seperti ruang sumber belajar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menunjang belajar bagi anak berkebutuhan khusus di antaranya; unit pelayanan tuna rungu, unit pelayanan autis, unit pelayanan tuna grahita, unit pelayanan tuna netra; dan (c) ruang perpustakaan yang memiliki luas dan letak yang sangat strategis namun kelengkapan buku bacaan yang masih kurang representative.
- b. Bangunan dan fasilitas yang ada dapat menumbuhkan kemandirian bagi setiap anak, khususnya bagi anak penyandang disabilitas, seperti (a) adanya bahan bacaan untuk pengayaan, laboratorium, program khusus, ensiklopedi, dll bagi anak cerdas dan atau bakat istimewa (CIBI); (b) adanya kamus bahasa isyarat, poster isyarat/alphabet, kartu penunjuk gambar kata, kalimat, pemutar video bagi anak tuna rungu; dan (c) adanya perangkat bongkar pasang/teka-teki, bentuk geometri tiga dimensi, alat berhitung taktis bagi anak tuna grahita.
- c. Bangunan dan fasilitas pendukung lainnya untuk memudahkan mobilitas semua anak di SDN 20 Mataram, seperti adanya (a) peralatan identifikasi dan asesmen, hal ini dilakukan pada saat anak baru masuk sekolah dan dilakukan asesmen secara berkala untuk melihat kemajuan anak di sekolah; (b) tersedianya bahan ajar yang disesuaikan dengan bidang garapan yang dikembangkan, miskipun jumlahnya terbatas, (c) tersedianya ruang konsultasi atau pelayanan yang nyaman, dan (d) Sekolah memiliki fasilitas pembinaan bakat di bidang seni dan olah raga, bahkan sering anak berkebutuhan khusus (ABK) di SD Negeri 20 Mataram ini mendapatkan juara

atau prestasi dibidang olah raga pada bidang lomba renang dan lain-lain.

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa SD Negeri 20 Mataram selaku penyelenggara pendidikan inklusif telah memiliki standar yang cukup memadai untuk memberikan layanan pendidikan berdasarkan kekhususan peserta didik yang ada di sekolah tersebut, seperti anak autis, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, dan doum sindrom. Namun demikian, Sekolah Dasar Negeri 20 Mataram memiliki keterbatasan dalam menerima anak dengan semua karakter difabel terutama bagi anak tuna Netra. Sekolah memiliki keterbatasan sarana prasarana belajar untuk menunjang proses pembelajaran bagi anak yang tuna netra, seperti tulisan atau bahan bacaan berupa tulisan broiler, computer broiler, dan lain-lain.

Ada beberapa kendala yang dirasakan oleh pihak sekolah dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif yakni aspek pembiayaan. Secara teoritik biaya penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki baget lebih besar dibanding dengan sekolah reguler biasa karena siswa yang ditangani sangat heterogen dan harus mampu memberikan layanan terbaik untuk setiap anak secara maksimal. Fakta lapangan menunjukkan bahwa anggaran operasional Sekolah Dasar Negeri 20 Mataram memiliki anggaran yang hampir sama dengan sekolah reguler pada umumnya. Keterbatasan sumber daya ini dapat mempengaruhi kemampuan sekolah untuk memberikan dukungan yang memadai kepada siswa dengan berkebutuhan khusus seperti dalam hal penyediaan dan pemeliharaan aksesibilitas pendukung, penyediaan peralatan alat belajar bagi guru maupun siswa, dan tenaga pendidikan dan kependidikan di sekolah.

Kurikulum pendidikan selama ini bersifat general, berlaku untuk masing-masing jenjang pendidikan. Kurikulum pendidikan dasar di SDN 20 Mataram sejauh ini masih sama dengan kurikulum pendidikan dasar di sekolah reguler lainnya. Hal ini tentunya tidak memadai atau tidak inklusif dan dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kurikulum yang kurang fleksibel atau tidak mengakomodasi kebutuhan individu siswa yang berkebutuhan khusus dapat menghambat kemajuan mereka dalam pembelajaran. Langkah yang ditempuh oleh pihak sekolah dalam hal ini yakni guru mengkonstruksi sendiri materi belajar khusus untuk keperluan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik siswa ABK. Demikian halnya dengan rancangan

pembelajaran dan instrumen pembelajaran yang dikembangkan guru sifatnya lebih sederhana agar anak ABK dapat mencapai target pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

Di dalam penyelenggaraan sekolah inklusif seperti halnya sekolah umum lainnya, masalah yang sangat penting dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yakni masalah sumber daya manusia (SDM) berupa tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan. SDM dimaksud secara umum dikategorisasi menjadi dua yakni yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran (akademik) dan yang tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran (non akademik). Mereka membentuk satu tim yang saling bekerjasama dan memiliki ketergantungan antara satu dengan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif. Tenaga-tanaga pendidik maupun tenaga kependidikan (SDM) yang ada di SD Negeri 20 Mataram, berdasarkan rasio jumlah guru dengan jumlah siswa (rombongan belajar) masih cukup representative, meliputi:

- a. SDM yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran, yaitu: guru kelas sebanyak 6 orang), guru bidang studi sebanyak 2 orang (guru olah raga, guru agama, dan guru), guru BK (bimbingan dan konseling) sejumlah 1 orang, dan konsultan pendidikan khusus atau guru kunjung sebanyak 7 orang guru yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Kota Mataram yang berstatus sebagai guru pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Kota Mataram.
- b. SDM yang tidak langsung terlibat dalam proses pembelajaran, namun sebagai pendukung yang merupakan tim ahli, terdiri dari terapis (*occupational therapist, fisiotherapist, speech therapist, dll*), ahli gizi, dokter (umum dan spesialis anak, psikiatri anak, THT), dokter gigi, pekerja sosial. Untuk mencukupi kebutuhan tim ahli sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pendidikan inklusi, Sekolah Dasar Negeri 20 Mataram ini melakukan kerja sama (MoU) dengan Rumah Sakit Jiwa di Selagalas. Di dalam MoU tersebut salah satunya disepakati bahwa pihak Rumah Sakit Jiwa siap membantu kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran berbasis inklusi di SD Negeri 20 Mataram.
- c. SDM yang tidak langsung terlibat dalam proses pembelajaran namun memiliki fungsi yang sangat strategis adalah tenaga administrasi dan tenaga khusus (Penjaga sekolah, tenaga

kebersihan, dan pesuruh). Tenaga administrasi di SD Negeri 20 Mataram sebanyak 2 orang masing-masing berstatus sebagai tenaga honorer. Demikian halnya dengan penjaga sekolah sekaligus merangkap tenaga kebersihan, dan pesuruh berjumlah 1 orang yang berstatus sebagai tenaga honorer.

Dalam proses kegiatan pembelajaran, setiap SDM memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Mereka membentuk satu tim dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi peserta didiknya baik yang menyangkut masalah akademik maupun masalah yang berhubungan dengan kesehatan, sosial, psikologis dan penyelenggaraan administrasi sekolah. Kualifikasi tenaga yang dibutuhkan berlatar belakang pendidikan sesuai kompetensinya dan tugasnya masing-masing. Guru kelas merupakan lulusan S-1 sesuai kualifikasi pendidikannya, misalnya Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan lain-lain. Selain itu guru khusus berkualifikasi S-1 PLB yang memiliki tugas langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Guru pendamping khusus merupakan lulusan SI PLB yang bertugas sebagai *shadow* yakni mendampingi siswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Guru bimbingan konseling memiliki tugas membantu guru kelas/bidang studi dalam menangani siswanya yang mengalami masalah-masalah non akademis yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Konsultan pendidikan khusus bertugas menangani masalah-masalah akademik siswa yang tidak dapat ditangani oleh guru.

Kualifikasi sumberdaya manusia yang tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran berlatar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya dan kompetensinya. Tenaga psikolog minimal lulusan SI psikologi, ahli gizi minimal lulusan SI ilmu gizi, dokter umum lulusan SI kedokteran, dokter spesialis merupakan dokter yang mengambil spesialisasi, dan dokter gigi lulusan kedokteran gigi. Sedangkan pekerja sosial berkualifikasi D3 pekerja sosial, dan tenaga administrasi mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administrasi penyelenggaraan sekolah, minimal berpendidikan SMK administrasi.

Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam memenuhi standar kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, SD Negeri 20 Mataram melakukan kerjasama (MoU) dengan berbagai kalangan. Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat diinventarisasi

lembaga-lembaga yang terlibat kerjasama di antaranya;

- a. Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Kota Mataram, sebagai sumber tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan guru pembimbing khusus (GPK). Dipersyaratkan adanya minimal 1 GPK baik dari sekolah maupun dari pusat sumber (luar sekolah). Kualifikasi pendidikan GPK sesuai dengan ketentuan yakni sarjana S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau yang mempunyai sertifikat kewenangan tambahan.
- b. Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mendapatkan layanan atau tenaga psikolog/psikiater/terapis/dokter.
- c. Pemerintah Daerah di Kota Mataram, khususnya Dinas Pendidikan Kota Mataram selaku Pembina pelaksanaan *pilot project* pendidikan Inklusif memberi dukungan penuh penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- d. *Stakeholder* yakni suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau sekolah. Dalam hal ini meliputi orang tua siswa, masyarakat sekitar (khusus Lingkungan Karang Tatah dan Lingkungan Pengempel), lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga terapis anak berkebutuhan khusus (ABK), dan pihak swasta lainnya.

Beberapa kelemahan manajemen pengeloaan pendidikan inklusif di SDN 20 Mataram yakni minimnya pelatihan dan dukungan dari sebagian guru. Adanya kebijakan mutasi guru antar sekolah reguler dengan sekolah inklusi menjadi tantangan sendiri bagi pihak sekolah dalam memberikan layanan secara maksimal pada sekolah inklusif. Sering kali guru yang pindah ke SDN 20 Mataram sangat minim pengetahuan dan pengalaman terkait pendidikan inklusi sehingga agak sulit mampu beradaptasi dengan baik. Padahal guru dan tenaga pendidik memainkan peran kunci dalam pendidikan inklusi. Disisi lain mereka belum memiliki pengalaman yang memadai untuk menghadapi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan dukungan dapat menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang efektif.

Stigma sosial dan kesadaran masyarakat terkait pendidikan inklusif masih kurang. Stigma sosial terhadap siswa dengan kebutuhan khusus masih merupakan tantangan yang signifikan di SDN

20 Mataram bahkan dibeberapa lembaga pendidikan inklusi di Nusa Tenggara Barat. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi dapat menghalangi integrasi siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan pendidikan yang inklusif. Masyarakat masih kurang memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan potensi siswa dengan kebutuhan khusus, stereotip bahwa siswa dengan kebutuhan khusus tidak dapat mengikuti kurikulum reguler, atau kekhawatiran bahwa siswa lain akan terganggu oleh keberadaan siswa dengan kebutuhan khusus.

Menyadari stigma sosial dan kesadaran masyarakat tersebut, maka ada beberapa ikhtiar dilakukan oleh kepala sekolah, di antaranya; melakukan sosialisasi, peningkatan advokasi oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan organisasi-organisasi yang bekerja untuk inklusi, serta peningkatan pemahaman ilmiah tentang manfaat pendidikan inklusif bagi semua siswa. Bermula dari ini kemudian masyarakat mulai menyadari bahwa pendidikan inklusif memberikan manfaat bagi siswa dengan kebutuhan khusus, seperti peningkatan interaksi sosial, perkembangan keterampilan akademik, dan kemandirian. Selain itu, pendidikan inklusif juga memberikan manfaat bagi siswa tanpa kebutuhan khusus, seperti meningkatkan empati, saling pengertian, dan kerja sama. Meskipun demikian, stigma sosial terkait dengan pendidikan inklusif masih ada dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, perlu terus dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pendidikan inklusif dan menghilangkan stereotip dan diskriminasi. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan individu untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua siswa.

Harapan dari pendidikan inklusi di Daerah Nusa Tenggara Barat dan di Indonesia pada umumnya, yakni mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan kemampuan, keadaan, atau kebutuhan khusus. Dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara (1977) sebagai Tokoh Pendidikan Nasional Indonesia, peletak dasar yang kuat pendidikan nasional yang progresif untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang merumuskan pengertian pendidikan yakni "sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak) dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar

supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya. Dipertegas pandangan ini oleh Stubbs (2008) bahwa pendidikan inklusi merupakan suatu proses peningkatan partisipasi siswa dan mengurangi keterpisahan siswa dari budaya, kurikulum dan komunitas sekolahnya.

Proses penyelenggara pendidikan inklusi di SD Negeri 20 Mataram dalam mengakses siswa berkebutuhan khusus dilakukan dari sejak awal penerimaan siswa baru. Dilakukan proses interview dengan orang tua siswa dan pengamatan terhadap kegiatan proses belajar mengajar guna mendapatkan data akurat terkait anak berkebutuhan khusus. Sebagai contoh anak berkebutuhan yang nota bene lamban dalam mengikuti proses belajar mengajar (*slow learner*) butuh waktu yang cukup untuk dapat memastikan anak yang bersangkutan dalam kategori *slow learner*, sehingga diperlukan kegiatan observasi intensif. Setiap anak diobservasi perkembangan psikologis belajarnya dengan melibatkan psikiater di luar sekolah.

Secara kuantitatif jumlah guru di SD Negeri 20 Mataram dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang kategorikan sebagai siswa ABK (anak berkebutuhan khusus) sebanyak 71 orang siswa maka dapat dikatakan jumlahnya cukup berimbang, yakni memiliki 12 orang guru dibantu dengan guru pembimbing khusus (GPK) sebanyak 7 orang. Dengan demikian jumlah keseluruhan guru di SD Negeri 20 Mataram cukup sebanyak 19 orang guru. Dari 71 orang siswa tersebut yang termasuk dalam kategori anak tuna grahita sebanyak 44 orang siswa, tuna daksa ringan 1 orang siswa, kesulitan belajar 5 orang siswa, tuna rungu 1 orang siswa, dan 1 siswa indigo. Selain itu, ditegaskan oleh Ibu Astuti bahwa setiap guru di SD Negeri 20 Mataram, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas rata-rata telah mendapatkan pelatihan dan workshop pendidikan inklusif. Artinya setiap guru yang mengajar di SD Negeri 20 Mataram telah memiliki kompetensi yang cukup untuk menangani para siswa ABK.

Berdasarkan realitas tersebut, kebijakan kepala sekolah untuk memberikan delegasi dan kewenangan penuh kepada guru-guru kelas, guru bidang studi, dan guru pembimbing khusus (GPK) dalam implementasi pendidikan inklusif. Meskipun demikian, masing-masing guru dalam melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut tetap melakukan koordinasi antara satu dengan lainnya dan bertanggungjawab langsung kepada kepala

sekolah. Guru yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu dilimpahkan kepada guru kelas. Guru yang dimaksud meliputi guru mata pelajaran agama dan guru olah raga, Tugas guru kelas ini adalah membantu guru kelas dan guru pembimbing khusus dalam pelaksanaan pembelajaran yang efektif bagi siswa.

Selain guru kelas dan guru bidang studi, guru yang secara langsung memberikan kontribusi pelaksanaan pembelajaran inklusif yang aktif dan efektif di SD Negeri 20 Mataram adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). Status GPK di sekolah ini sebagai guru pedamping pelaksanaan pendidikan inklusif yang diberikan tugas langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar dengan para siswa yang biasa atau normal, selain sebagai guru tetap di Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Koata Mataram. Eksistensi GPK bagi sekolah di SD Negeri 20 Mataram sangatlah besar yakni memiliki tugas dan fungsi sebagai pendamping dan bekerja sama dengan guru kelas atau guru bidang studi dalam memberikan assesmen, menyusun program pengajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus. Disamping itu GPK bertugas memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif. Materi yang menjadi tanggung jawab GPK meliputi layanan pembelajaran pra-akademik, layanan kekhususan dan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam pembelajaran akademik.

Kurikulum dalam pendidikan inklusif di SD Negeri 20 Mataram telah disesuaikan dengan kebutuhan anak, artinya kurikulum untuk setiap mata pelajaran di sekolah inklusi secara khusus dimodifikasi sesuai dengan perkembangan anak berkebutuhan khusus (ABK). Jika selama ini anak dipaksakan harus mengikuti kurikulum sekolah tanpa terkecuali, pada pendidikan inklusi kurikulum disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak di sekolah. Dengan demikian, anak memiliki keleluasaan dalam mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan, bakan dan minat. Modifikasi (penyesuaian) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari: kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.

Bagi anak yang membutuhkan layanan khusus disediakan dukungan berkesinambungan

yang berkisar dari bantuan minimal di kelas reguler hingga progam pelajaran tambahan di sekolah itu dan bila diperlukan diperlukan dengan penyediaan bantuan guru pembimbing khusus (GPK) yang berlatar belakang S1 PLB dan atau guru yang telah mengikuti Diklat Pendidikan Inklusi. Peran GPK di SD Negeri 20 Mataram bukan sebagai guru kelas, guru mata pelajaran dan guru BP, melainkan melaksanakan tugas sebagai guru khusus yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. GPK melaksanakan tatap muka pembelajaran minimal 6 jam/ minggu, selebihnya bertugas sebagai pembimbingan khusus. Dengan demikian GPK memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri 20 Mataram.

Mengembangkan lingkungan sekolah reguler yang inklusif saat ini sudah menjadi sebuah keharusan. Banyak sekolah yang telah merintis program inklusi berusaha memastikan semua siswa merasa dihargai dengan memberikan semua kebutuhan belajar mereka dan membantu mereka mencapai potensi yang maksimal. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah lembaga yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan komunitas ramah, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua. Agar inklusi menjadi kenyataan, maka pendidikan inklusif harus mampu merubah dan menjamin semua pihak untuk membuktikan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Beberapa harapan dan sekaligus impian penyelenggara pendidikan inklusi khususnya bagi anak berkebutuhan khusus di antaranya:

- a. Akses pendidikan yang setara (*education for all*), yakni memberikan akses yang setara bagi semua siswa ke pendidikan yang berkualitas. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi atau pemisahan berdasarkan kemampuan atau kebutuhan mereka.
- b. Lingkungan belajar yang inklusif di mana semua siswa merasa diterima, dihargai, dan didukung tanpa ada diskriminasi. Lingkungan yang inklusif mempromosikan keberagaman, toleransi, dan persamaan di antara siswa.
- c. Penghargaan terhadap keunikan individu. Harapannya adalah mengubah paradigma dari standar satu ukuran cocok untuk semua menjadi pendekatan yang mengakui dan menghormati perbedaan individu dalam proses pembelajaran.

- d. Pembelajaran kolaboratif yakni pendekatan inklusif dengan mendorong pembelajaran kolaboratif di mana siswa dengan kebutuhan khusus bekerja sama dengan siswa lain dalam konteks yang inklusif. Hal ini membantu menciptakan lingkungan di mana saling membantu dan saling belajar menjadi nilai yang penting.
- e. Kesetaraan dan kesempatan yang adil: Pendekatan inklusif diharapkan dapat mengatasi kesenjangan dan ketimpangan dalam pendidikan. Harapannya adalah memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam bidang akademik, sosial, dan emosional.
- f. Peningkatan keterampilan hidup (life skills) kepada siswa berkebutuhan khusus terkait dengan keterampilan hidup yang relevan dan memadai. Pendidikan inklusi bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri, produktif, dan berpartisipasi secara penuh.

4. SIMPULAN

Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Nusa Tenggara Barat, khusus di SD Negeri 20 Mataram telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari aksesibilitas infrastruktur sekolah dan lingkungan sekolah yang cukup representative dalam menerapkan pendidikan inklusif. Selain itu tenaga-tanaga pendidik maupun tenaga kependidikan (SDM) yang ada di sekolah berdasarkan rasio jumlah guru dengan jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) sudah memadai. Kolaborasi yang dibangun oleh pihak sekolah dengan berbagai pihak seperti sekolah luar biasa (SLB) untuk mendapatkan guru pembimbing khusus, rumah sakit umum (RSU) Kota Mataram, psikolog dan stakeholders lain menjadi penguatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yakni pendidikan untuk semua tanpa ada bullying dan tindakan diskriminasi. Kekhasan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 20 Mataram yakni pada penetapan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dimasing-masing kelas berbeda bahkan untuk masing-masing kelas. Penetapan standar KKM bagi siswa normal berbeda dengan siswa ABK. Disamping itu, sekolah juga memiliki penanganan khusus bagi siswa ABK yang masih labil atau "sakit" oleh GPK di ruang sumber.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, Mel, Roger Slee, and Marnie Best. 2019. "The Salamanca Statement: 25 Years On." *International Journal of Inclusive Education*. Taylor & Francis.
- Alfian. (2013). Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Edu-Bio*, 4(4).
- Angreni, S., & Sari, R. T. 2020. Identifikasi dan Implementasi Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Sumatera Barat. *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.24252/10.24252/auladuna.v7i2a4.2020>
- Barsihanor, B., & Anindia Rosyida, D. 2019. Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin. *Jurnal Tarbiyatuna*, 10(2). <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v10i2.2712>
- Barton, Len, and Sally Tomlinson. 2012. *Special Education and Social Interests (RLE Edu M)*. Routledge.
- Bogdan, RC and Biklen, S.K., Qualitative Research for Education an Introduction to Theory and Methods, (Allyn and Bacon Inc., London, 1982)
- Creswell, J W. 2012. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson. <https://books.google.co.id/books?id=4PywcQAAQAJ>
- Dewantara, Ki Hajar. 1977. *Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Bagian Pertama Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Vol. 1.
- Kusnia, Nurin. 2019. "Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di SDN Betet 1 Kediri." *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan* 3 (1).
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. 1992. "Analisis Data Kualitatif." Jakarta: UI press.
- Mishra, Dr. Shanti Bhushan, and Dr. Shashi Alok. 2017. *Handbook Of Research Methodology*.
- Nasution, S. 1998. "Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif." Bandung: Tarsito.
- Peters, Susan J. 2004. *Inclusive Education: An Efa Strategy For All Children*.
- Praptiningrum, N. 2010. "Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus." *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)* 7 (2).
- Sri Wahyuningsih. 2021. PUSLAPDIK Kemendikbudristek. Hari Disabilitas Internasional 2021: Libatkan Penyandang

Society: Jurnal Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Volume 14, No. 1, Bulan Juni Tahun 2023 hlm. 1-10

P-ISSN: 2087-0493 E-ISSN: 2715-5994

Disabilitas PascaCovid-19.

Stubbs, Sue. 2008. "Inclusive Education." *Where There Are Few Resources. Oslo, The Atlas Alliance Publ.*

Sulthon, Sulthon. 2019. "Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan Dan Kenyataan." *Inklusi* 6 (1): 151-72.

Supa'at, Supa'at, and Abdul Karim. 2021. "Peer Review Jurnal: Pendidikan Dasar Inklusif Di Kabupaten Pati: Harapan Dan Kenyataan." <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/4808>.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

UNESCO. 2020. "Global Education Monitoring Report Inclusion and Education: All Means All Easy to Read Version Key Messages," 14. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000373724?posInSet=1&queryId=N-ed62d962-63ed-4769-a350-6c8e985a7fc2>.

Wulandari, Ratna Sari, and Wiwin Hendriani. 2021. "Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi Di Indonesia (Suatu Pendekatan Systematic Review)." *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran* 7 (1): 143-57.